

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 47 menjelaskan bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya (Permenkes RI, 2019)

Pada saat ini organisasi pelayanan kesehatan menghadapi dua tekanan secara simultan. Pertama, tekanan atau tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan harga yang terjangkau. Kedua, sulitnya mendapatkan sumber daya yang semakin terbatas untuk memberikan pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu tersebut (Hasibuan, 2018)

Pelayanan adalah kunci keberhasilan dalam berbagai usaha atau kegiatan yang bersifat jasa. Perannya akan lebih besar dan bersifat menentukan manakala dalam kegiatan-kegiatan jasa di masyarakat itu terdapat kompetisi dalam usaha merebut pasaran atau langganan. Begitu pula di bidang Pemerintahan, masalah pelayanan perannya sangat besar karena menyangkut kepentingan umum, bahkan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Karena pelayanan peranan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah melibatkan seluruh aparat Pegawai Negeri makin terasa dengan adanya peningkatan kesadaran bernegara dan bermasyarakat, maka pelayanan telah meningkat kedudukannya di mata masyarakat menjadi suatu hak, yaitu hak atas pelayanan (Imbalo, 2018)

Salah satu instansi penyedia pelayanan yang masih dipertanyakan kualitas pelayanannya adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana. Terutama yang disorot dalam pelaksanaannya adalah program Keluarga Berencana yang berfungsi menekan laju

pertumbuhan. Setelah program KB yang semula dipegang oleh BKKBN ini melebur untuk tingkat kota dan kabupaten, yang mana untuk tingkat Kabupaten Buleleng sendiri pelaksanaannya dijalankan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana, mulai muncul semacam keraguan apakah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana dapat meneruskan tren positif pelaksanaan program KB (BKKBN, 2018)

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2008 tentang penjabaran tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng disebutkan pada bagian kedelapan pasal 32 bahwa bidang keluarga berencana mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang pelayanan keluarga berencana. Selanjutnya dalam pasal 33 dijelaskan lebih lanjut bahwa bidang keluarga berencana pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng mempunyai fungsi penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, rencana program dan rencana kerja anggaran, serta pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pelayanan Keluarga Berencana (Sujiatini, 2018)

Badan Pusat Statistik mencatat bahwa laju pertumbuhan penduduk Indonesia selama periode 2010-2020 lebih tinggi dibanding periode 2000-2010. Laju pertumbuhan penduduk 2010-2020 mencapai 1,49 persen atau lebih tinggi dibanding periode 2000-2010 yang hanya mencapai 1,45 persen, sesuai dengan hasil sensus 2020 jumlah penduduk Indonesia mencapai 237,56 juta orang. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan 237,56 juta orang dibutuhkan lahan produktif untuk tanaman padi seluas 13 juta ha, namun saat ini lahan padi yang diolah seluas 7,7 ha, jika penambahan penduduk setiap tahunnya sebesar 1,49% atau bahkan lebih, maka masalah kependudukan dengan sendirinya akan mendatangkan masalah-masalah sosial lainnya seperti masalah kemiskinan, kelaparan, kekumuhan kota, kriminalitas, berkurangnya daya dukung

lahan dan masalah-masalah sosial lainnya (Badan Pusat Statistika, 2020)

Kualitas dan akses pelayanan KB menuntut perubahan paradigma terutama di kalangan Penyelenggara Pelayanan yang dalam hal ini adalah Bapermas dan KB. Itulah sebabnya pelayanan harus dilaksanakan atas dasar kesukarelaan, keterbukaan, dan kejujuran. Para pegawai Bapermas dan KB harus memiliki kemampuan untuk menjelaskan setiap alat kontrasepsi secara benar dan lengkap dengan segala kelebihan dan kekurangannya, disamping harus mengikuti standar pelayanan yang telah ditentukan (Marni, 2018)

Program Keluarga Berencana ini pada dasarnya bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk dengan memberikan solusi berupa pemasangan ataupun pemakaian alat kontrasepsi. Program Keluarga Berencana pertama kali dilaksanakan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dan sempat berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk pada masa itu. Untuk perkembangannya sekarang ini terutama di wilayah Semarang, Program KB sedikit banyak mengalami perubahan dengan ditandai adanya revitalisasi (Purba, dkk, 2021)

Ada banyak alasan mengapa pengawasan penting dan dibutuhkan. Alasan sangat fundamental dan universal mengapa pimpinan membutuhkan pengawasan adalah kebutuhan memonitor apa yang orang atau unit organisasi sedang dikerjakan dan secara khusus hasil dari apa yang mereka kerjakan. Alasan lain adalah untuk mengetahui perubahan-perubahan yang dihadapi oleh organisasi dan pimpinan. Pengawasan sebagai elemen atau fungsi keempat manajemen ialah mengamati dan mengalokasikan dengan tepat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi (Susanto, 2022)

Perlunya suatu pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan program KB di Puskesmas agar dapat berjalan dengan baik, serta perlunya suatu bentuk pengelolaan manajemen yang baik yang akan menjadi panduan dalam pelaksanaannya. Pengawasan (pengendalian) atau

controlling adalah bagian terakhir dari fungsi manajemen. Fungsi manajemen yang dikendalikan adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan itu sendiri. Kasus-kasus yang banyak terjadi dalam suatu organisasi adalah akibat masih lemahnya pengendalian sehingga terjadilah berbagai penyimpangan antara yang direncanakan dengan yang dilaksanakan

Berdasarkan hasil survey awal yang dilakukan peneliti di wilayah kerja Puskesmas Lahomi menjelaskan bahwa proses penyediaan alat dan bahan KB masih belum terlaksana dengan baik dan benar. Peneliti melihat bahwa alat dan bahan KB terkadang tidak tersedia dalam jumlah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Penyimpanan alat dan bahan KB juga masih belum benar, hal ini terlihat dari penyimpanan KB suntik masih disimpan di Gudang dan kurang memperhatikan SOP yang sudah ditetapkan oleh Puskesmas Lahomi.

Peneliti juga melihat tentang bagaimana implementasi penyediaan alat dan bahan KB di Puskesmas Lahomi yaitu alat dan bahan KB masih kurang terlaksana dengan baik dan benar. Peneliti melihat bahwa alat dan bahan KB sering tersedia dalam jumlah yang sedikit, penyimpanannya juga tidak sesuai dengan aturan penyimpanan alat dan bahan KB yang seharusnya. Peneliti juga menemukan data bahwa Puskesmas sering mengalami kekurangan alat dan bahan KB, dan terkadang waktu pengamprahannya sering dalam waktu yang cukup lama.

Berdasarkan Penomena tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “analisa faktor-faktor pengaruh terhadap penyediaan alat dan bahan KB di UPT Puskesmas Non Rawat Inap Lahomi Kabupaten Nias Barat”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah analisa faktor-faktor

pengaruh terhadap penyediaan alat dan bahan KB di UPT Puskesmas Non Rawat Inap Lahomi Kabupaten Nias Barat”.